

LAPORAN PENELITIAN INSENTIF KOMPETITIF



**ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN**

1. Drs. Amil, MM (Ketua)
NIDN. 0831126204
2. Rifaid, S.IP., M.IP (Anggota)
NIDN. 0812118704
3. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (Anggota)
NIDN. 0816057902

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Juni, 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **Analisis Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB Dalam Pembangunan Ketanagakerjaan**
b. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial
2. Ketua Penelitian
a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Amil, MM
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Golongan/Pangkat/NIDN : IV/a/0831126204
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Prodi/Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMMat
3. Alamat Ketua Penelitian
a. Alamat kantor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Pagesangan Mataram
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail : Jalan Cemara Blok i/15 RT 06 BTN Puncang Hijau
Desa Sandik Kabupaten Lombok Barat
c. Telp/ E-mail : [087857080042](tel:087857080042)
4. Anggota Peneliti
a. Nama Anggota : Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Golongan/Pangkat/NIDN : III.c/0816057902
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Prodi/Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMMat
5. Anggota Peneliti
a. Nama Anggota : Rifaid S.IP., M.IP
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Golongan/Pangkat/NIDN : III.b/0812118704
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Prodi/Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMMat
6. Lokasi Penelitian : Dinas Ketanagakerjaan dan Transmigrasi NTB
7. Lama Penelitian : 6 bulan
8. Biaya yang diperlukan :
a. LPPM UMMAT : Rp. 4.000,000,_
b. Sumber lain,sebutkan : Rp.
Jumlah : Rp. 4.000,000, _ (*Terbilang: Empat Juta Rupiah*)

Menyetujui,
Dekan FISIPOL UMMat



Dr. Iwan Tanjung, S.AP., M.PA
NIDN. 0806058401

Mataram, 23 Juni 2025

Ketua

Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126204

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dr. Sri Rejeki, M.Pd
NIP. 196612101993032002

RINGKASA PENELITIAN

ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NTB DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN 2024-2028

Oleh:

Drs. Amil, MM (Ketua)

Ayatullah Hadi., M.IP (Anggota)

Rifaid, S.IP, S.IP., M.IP (Anggota)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, yang bertujuan menyelaraskan program kerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Fokus utama RKPD ini mencakup penurunan angka pengangguran, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja di NTB mencapai 2,79 juta orang, dengan 2,71 juta di antaranya telah bekerja, sehingga tingkat pengangguran turun menjadi 2,98 persen, melampaui target RPJMD sebesar 3,17 persen. Namun, dengan penambahan lebih dari 50 ribu angkatan kerja baru setiap tahunnya, diperlukan strategi khusus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Disnakertrans NTB telah mengidentifikasi enam langkah strategis untuk mengatasi pengangguran, antara lain perencanaan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, perlindungan sosial ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, serta implementasi peraturan presiden terkait. Program Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePaDu Plus) menjadi salah satu upaya konkret, dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam proses pelatihan guna memastikan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif komperatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis kepustakaan atau *Libary Research* untuk mendapatkan data sekunder. Adapun Luaran Penelitian ini Akan dipublikasikan di **JGLP: Jurnal of Govenment and Local politics**, Sinta 3.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan NTB

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Kajian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Luaran Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB	8
2.2. Pembangunan ketenagakerjaan.....	10
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB IV. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	12
3.1.1. Metode	12
3.1.2. Prosedur Penelitian	13
3.1.3. Data dan Sumber Data	13
3.1.4. Teknik dan Prosedur Pengumpulan data.....	14
3.1.4.1. Teknik.....	14
3.1.3.2. Prosedur Pengumpulan data	14
3.1.5. Prosedur Analisis Data	14
3.1.6. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	15
BAB V. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DICAPAI	
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan	16
5.2. Luaran Publikasi	
BAB VI. BIAYA PENELITIAN	
6.1. Kesimpulan.....	21
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1. PENDAHULUAN

Indonesia tiga puluh tahun terakhir telah mengalami perbaikan baik dari segi resesi ekonomi dan stagnansi, walaupun demikian pertumbuhannya tidak dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Sehingga permasalahan pengangguran saat ini menjadi isu strategis nasional yang bisa menimbulkan ancaman secara nasional. (Pratomo, Y. S, 2020). salah satu ancaman yang dapat meningkatkan angka pengangguran diantaranya meningkatnya lulusan SMK semakin tinggi, lulusan dari perguruan tinggi dari berbagai universitas yang tidak dapat langsung diserap oleh pasar kerja, juga tidak tersedianya lapangan kerja yang memadai yang disediakan oleh pemerintah mengakibatkan angka pengangguran setiap tahunnya semakin meningkat, pada Agustus 2023 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 Juta orang atau 5,32% (BPS, 2023).

Sejak diberlakukan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberi kesempatan kepada tenaga kerja asing bebas masuk di Indonesia dengan persyaratan dan perijinan yang lebih mudah, sehingga tenaga kerja kita yang tidak siap secara ketrampilan dan kemampuan teknis yang tidak memadai kalah saing di Negeri sendiri, dampaknya tentu lonjakan tenaga kerja dalam negeri tidak terserap dengan maksimal terjadilah pengangguran yang terus meningkat. Bersamaan dengan itu kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat mendorong revolusi industri generasi keempat atau biasa disebut Industry 4.0 memanfaatkan kecanggihan kecerdasan buatan, sehingga tidak perlu lagi membutuhkan tenaga manusia yang banyak, sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan teknologi baru ini mendorong manusia lebih banyak berinovasi agar tetap bertahan dan tidak lagi membutuhkan pekerjaan manusia dengan skala besar cukup dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan (Schwab, K, 2024)

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia lebih dianggap permasalahan tersendiri yang terlepas dari kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya, sehingga sering kali kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan gagal dalam menyelesaikannya sendiri. Akibatnya kebijakan tersebut terlihat sempit dan tidak bersifat menyeluruh, semestinya kebijakan yang berkaitan ketenagakerjaan lebih bersifat makro dan antar sektoral karena memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan ekonomi. Sebagaimana yang disampaikan oleh A.G.B. Fisher menyatakan bahwa struktur ekonomi akan mengalami perubahan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut menggambarkan bahwa masalah ketenagakerjaan jika ingin diatasi

dengan baik, maka seharusnya kebijakan-kebijakan tentang perubahan struktur ekonomi juga turut mendapat perhatian (Wulansari, C, Dewi, 2016).

Pada umumnya di banyak Negara berkembang memiliki cara berpikir, salah satu cara dalam memperkuat pembangunan ketenagakerjaan yaitu dengan cara memperbanyak sektor industri karena dengan semakin banyak sektor industri akan mampu mengatasi masalah-masalah perekonomian yang ditopang oleh banyaknya terserap tenaga kerja yang produktif. Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, memperluas kesempatan kerja, juga pemeratan pendapatan. Sehingga pembangunan ekonomi satu kesatuan dengan pembangunan ketenagakerjaan dan pembangunan pada bidang lainnya yang selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Untuk itu jumlah penduduk suatu negara merupakan unsur utama dalam pembangunan (Kuncoro, 2003; Fadel, M, *at., el*, 2021)

Kebijakan ketenagakerjaan merupakan hal yang *urgent* dalam aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan tenaga kerja baik waktu sebelum, selama dan setelah masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Tujuan adanya pembangunan ketenagakerjaan merupakan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembanguna nasional dan daerah. Jika dilihat kondisi tenagakerjaan di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan masih mengalami berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi pada sektor ketenagakerjaan diantaranya masih banyaknya pekerja yang bekerja dibidang sektor informal, ditambah rendahnya produktivitas dari sumberdaya manusia yang mengharapkan hasil yang instan (Echlesya, Lewanatur, *at., el*, 2024)

Data *Trading Economy*, dilihat dari presentase di Asia Tenggara Indonesia mendapat peringkat pengangguran kedua tertinggi tahun 2023 dengan angka 5,45%. Namun jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran tersebut turun dibandingkan angka pengangguran Februari tahun 2022 yang mencapai 5,83%. Data BPS juga mencatat angka pengangguran di Indonesia bulan Februari 2023 mencapai 7,99 juta orang namun dapat dikatakan berkurang 410 ribu orang apabila dibanding dengan tahun Februari 2022. (BPS, 2024). Di Nprovisi Nusa Tenggara Barat jumlah angkatan kerja pada February 2023 mencapai 2,87 Juta orang mengalami peningkatan sebanyak 85,74 ribu orang dibanding February 2022, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik sebesar 0,91% poin. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,73% turun 0,20% poin

dibandingkan Februari 2022, dan jika dibandingkan Februari 2021 mengalami penurunan 0,24% poin. (Dinas Ketenagakerjaan NTB, 2023).

Data penduduk yang bekerja pada Februari tahun 2023 sebanyak 2,76 juta orang, meningkat sebanyak 88,02 ribu orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan presentase tersebar adalah sektor Jasa Pendidikan (2,44% poin), Transportasi dan Pergudangan (0,68% poin), Administrasi Pemerintahan (0,51% poin), sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Pertanian (3,17% poin), Industri Pengolahan (1,21% poin) dan Perdagangan Besar & eceran (0,92% poin). (BPS, 2023).

Dilihat dari data di atas memberikan informasi progres Pemerintah Provinsi NTB dalam Pembangunan Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi cukup bagus dengan terus meningkatnya angka angkatan kerja yang terus naik dari tahun ke tahun, namun penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB bukan sekedar angka statistik yang menyajikan data angkatan kerja yang meningkat, namun lebih dari itu, seperti apa kebijakan strategis yang dibuat melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB yang menyelaraskan program kerja antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota sehingga tujuannya adalah penurunan angka pengangguran, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang hanya melihat dari aspek hukum dan ekonomi saja, penelitian ini lebih komprehensif dengan mengkaji dari sudut pandang kebijakan pemerintah dengan pendekatan Strukturalis sehingga kita bisa mengetahui muara dari kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di NTB bukan sekedar menekan angka pengangguran namun lebih pada menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan tujuannya supaya meningkatnya penyerapan ketenagakerjaan formal dan mengurangi dominasi sektor informal di NTB melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dan terciptalah pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan juga kesejahteraan masyarakat.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembangunan ketenagakerjaan 2024-2028

1.2. Ruang Lingkup Kajian

Adapun ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB kurun waktu 2024-2028 dalam pembangunan ketenagakerjaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui Arah Kebijakan Provinsi NTB dalam Pembangunan Ketenagakerjaan.

1.3. Luaran Penelitian

Adapun target luaran yang akan dicapai dalam hasil penelitian ini berupa Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal “**JGLP: Jurnal Of Government And Local Poitics**: Sinta 3

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB

Pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Anita, 2016). Pemerintah Provinsi NTB telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan industri. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi (Arliman S, 2017). Pemerintah NTB bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Program pendidikan vokasi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (Ashari, 2023).

Selain itu, kebijakan lain yang signifikan adalah pengembangan program wirausaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemerintah NTB memberikan berbagai insentif, pelatihan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha lokal guna menciptakan lapangan kerja baru. Program ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur dan regulasi yang kondusif untuk pertumbuhan bisnis (Sinaulan, 2019). Dalam bidang penempatan tenaga kerja, Pemerintah NTB telah mengadopsi kebijakan penguatan sistem informasi pasar kerja. Melalui platform digital dan pusat layanan tenaga kerja, pencari kerja dapat lebih mudah mengakses informasi terkait peluang kerja dan pelatihan yang tersedia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja (Wahidin et al., 2021).

Pemerintah NTB juga aktif dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal (Fatahillah & Padang, 2019). Melalui regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat dan program jaminan sosial tenaga kerja, diharapkan pekerja dapat memperoleh hak-hak mereka secara adil. Secara keseluruhan (Sihombing et al., 2022), kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di NTB menitikberatkan pada peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, diharapkan Provinsi NTB dapat terus mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (Nasution, 2021).

2.2 Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Lianto & Najicha, 2022). Berbagai negara dan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan industri. Salah satu kebijakan utama dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi (Muharam et al., 2022). Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Program pendidikan vokasi bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industry (Wibowo, 2023).

Selain itu, kebijakan lain yang signifikan adalah pengembangan program wirausaha dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemerintah memberikan berbagai insentif, pelatihan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha lokal guna menciptakan lapangan kerja baru. Program ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur dan regulasi yang kondusif untuk pertumbuhan bisnis (Kirana, 2022). Dalam bidang penempatan tenaga kerja, pemerintah telah mengadopsi kebijakan penguatan sistem informasi pasar kerja. Melalui platform digital dan pusat layanan tenaga kerja, pencari kerja dapat lebih mudah mengakses informasi terkait peluang kerja dan pelatihan yang tersedia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja (Lesmana et al., 2023).

Pemerintah juga aktif dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Melalui regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat dan program jaminan sosial tenaga kerja (Zairudin, 2022), diharapkan pekerja dapat memperoleh hak-hak mereka secara adil. Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, diharapkan tenaga kerja dapat berkembang menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi (Maulana & Hermana, 2021).

BAB 3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Arah Kebijakan Provinsi NTB dalam Pembangunan Ketenagakerjaan.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat merumuskan atas berbagai temua-temuan yang didapat setelah melakukan penelitian, sehingga menjadi peta jalan untuk riset-riset berkelanjutan.

2. Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan khazanah ilmu pengetahuan baik bagi mahasiswa, dosen dan dunia pendidikan pada umumnya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terutama dalam hal ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

3. Masyarakat

Adapun manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bagaimana proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidupnya

4. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang prima (mudah, cepat, tepat, murah) dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat

BAB 4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif komperatif dengan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan persamaan ataupun perbedaan, serta membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi baik alamiah maupun fenomena buatan manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, prosedur kerja, serta pandangan terhadap kasus, peristiwa ataupun ide-ide. Dalam penelitian penulis menggunakan analisis kepustakaan (*libary research*) untuk mencari data dan informasi melalui data sekunder yang diperoleh dari data center Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, hasil penelitian terdahulu, website resmi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB , publikasi pemerintah, hasil survei terdahulu, catata-catatan publik mengenai peristiwa resmi dan catatan-catatan perpustakaan. Data yang terkumpul tersebut kemudian dipilih, diolah dengan menggunakan tools pengolahan data, selanjutnya data tersebut diedit dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik dll dan dijelaskan secara naratif.

Berdasarkan pendapat diatas, keberhasilan suatu penelitian salah satu penunjang oleh metode penelitian yang tepat dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain metode penelitian sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian karena dalam metode penelitian ditemukan cara-cara bagaimana objek penelitian hendak diketahui dan diamati sehingga menghasilkan data-data yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

4.1 Jenis Data Penelitian

4.1.1 Data Primer

Data Primer penelitian ini diperoleh peneliti melalui interview dari beberapa sumber informan penelitian. Informan penelitian ini diantaranya pemangku kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB , BPS wilayah NTB, Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah yang konsen terhadap ketenagakerjaan, dapat diartikan data primer pada penelitian ini adalah data atau dokumen yang didapatkan dari sumber asli (faktual) yang dikumpulkan berdasarkan dari kondisi aktual dimana pada saat fenomena terjadi dan didapatkan langsung dari sumber penelitian utama.

4.1.2 Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang didapat dari publikasi artikel jurnal ilmiah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Website Resmi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, dokumen publikasi resmi Pemerintah, berita online,

dan hasil survey. Data sekunder yang dikumpulkan juga bisa dari sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi NTB

4.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, BPS wilayah NTB, dan Lembaga Pemerintah Maupun No-Pemerintah yang memiliki konsentrasi di bidang ketenagakerjaan terutama dalam hal mengawal kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB.

4.3 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

4.3.1 Teknik

Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian antara lain:

a. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono 2013:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara nyata dan mengamati secara langsung terkait Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dipersiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau aturan-aturan yang telah ada.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mengambil dokumentasi tentang Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4 Prosedur pengumpulan data

Suatu kegiatan penelitian sangat diperlukan alat pengumpulan data. Alat mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Instrumen Penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data tentang Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.5 Prosedur Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2008:334) menyatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246) langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Data-data yang diperoleh dari bermacam-macam cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dikumpulkan kemudian di reduksi dan dipilah-pilah.

2. Data reduction (Reduksi data)

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:349) menyebutkan reduksi data merupakan Proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini data yang telah dipilah-pilah diorganisirkan dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (display data) agar memperoleh gambaran secara utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut, dan baik dalam bentuk naratif, sehingga, sehingga mudah dipahami.

Penelitian kualitatif setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:249) menyebutkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan chart. Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks serta melampirkan data dalam bentuk tabel.

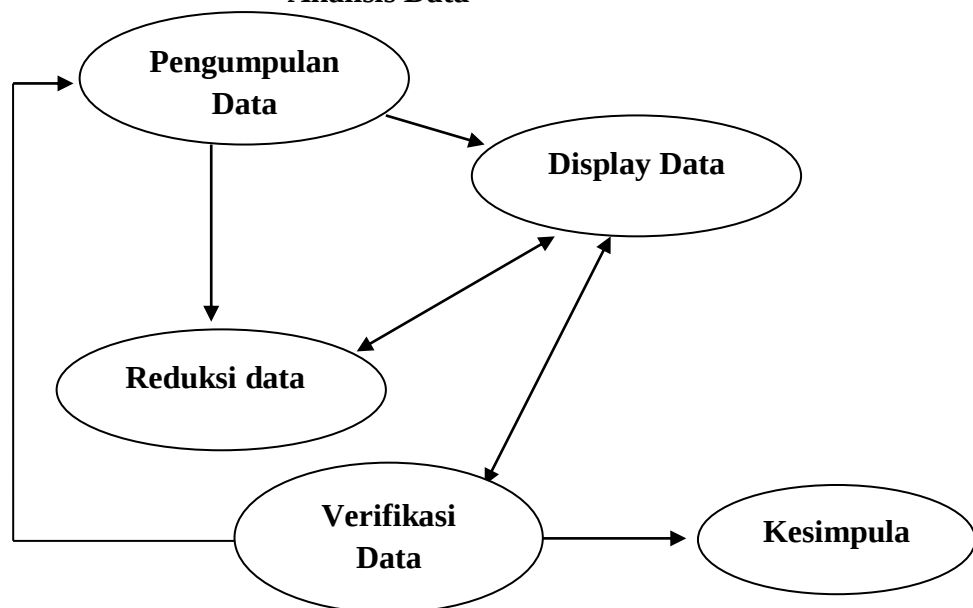
4. *Conclusion drawing* (Verifikasi data)

Verifikasi data merupakan kebenaran suatu data dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas, dapat berupa kausal, atau interaktif, hipotesis atau teori.

Bagan. 2
Analisis Data



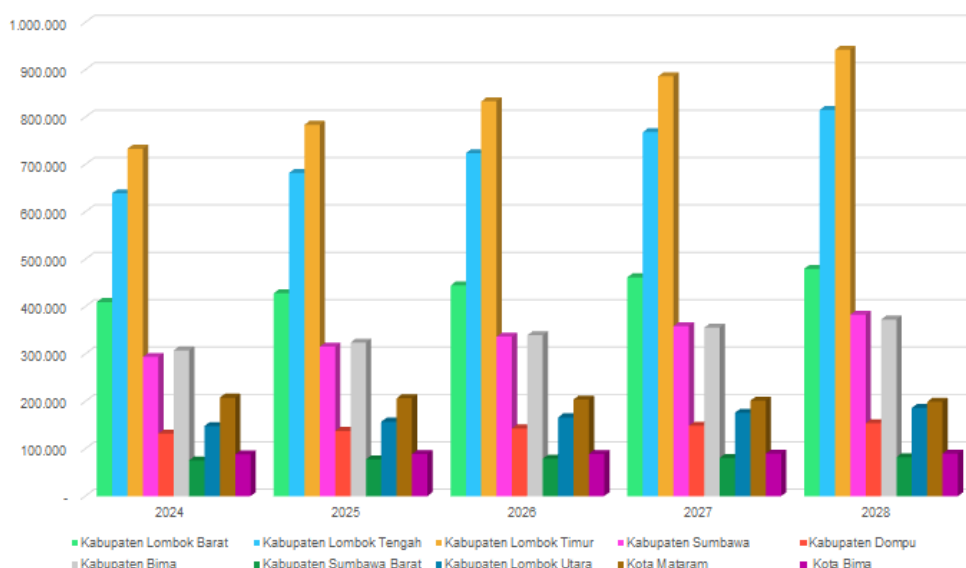
BAB 5. Hasil Pembahasan Dan Luaran Yang Dicapai

Arah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi NTB

Pada bagian ini akan dibahas arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembangunan ketenagakerjaan, sehingga langkah-langkah atau keputusan strategis yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Lianto & Najicha, 2022). Berbagai Negara dan pemerintah daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan industri. Salah satu kebijakan utama dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi (Muharam et al., 2022). Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Program pendidikan vokasi bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (Wibowo, 2023).

Kebijakan pelatihan bertujuan untuk koordinasi berkelanjutan kerjasama dengan dunia industri terkait pemagangan alumni-alumni pelatihan dari lembaga-lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta, sehingga mengoptimalkan kerjasama atau kemitraan antara lembaga pelatihan vokasi dengan industri seperti dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) maupun dengan Skill Development Centre (SDC). Dengan adanya kerjasama dan kemitraan yang baik maka akan tercipta potensi lembaga pelatihan baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan perusahaan untuk melakukan revitalisasi dan melengkapi sarana prasarana pendukung demi meningkatkan kualitas lulusan dengan prioritas kejuruan unggulan yang banyak dibutuhkan untuk pasar kerja. Berikut data proyeksi kesempatan kebutuhan tenaga kerja Provinsi NTB tahun 2004 sampai 2028.

Tabel.1 Proyeksi Perkiraan Kesempatan kerja Tenaga Kerja Provinsi NTB 2024-2028



Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi NTB, 2024

Berdasarkan grafik di atas, total perkiraan kesempatan kerja tenaga kerja Provinsi NTB tahun 2024 mencapai 3.034.903 orang dan naik sebesar 3.703.069 orang pada tahun 2028, dengan proporsi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur sebesar (25,45%), Kabupaten Lombok tengah sebesar (22,01%) dan Kabupaten Lombok Barat sebesar (12,96%). Angka kesempatan kerja sebenarnya bisa saja bertambah pertahunnya jika penguatan regulasi yang baru benar-benar sudah diterapkan dengan baik, namun Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang baru belum mampu merelisasikan hal tersebut, fokus utamanya adalah bagaimana sektor pertambangan yang memberi sumbangan Pendapatan Asli daerah (PAD) terbesar sudah bisa lagi beroperasi untuk ekspor. (Afriyana et al., 2023) menitikberatkan pada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap inklusi ekonomi secara struktural, sedangkan analisis grafik ini memberikan kesempatan kerja lebih menekankan peran kebijakan dan ekspor sektor tambang dalam mendorong pertumbuhan kesempatan kerja formal di masa depan. Pada Faktor Determinan (Wazari & Agustiarini, 2022) Mengkaji modal manusia (human capital) dan ekonomi digital sebagai faktor strategis dalam menyerap tenaga kerja formal Sedangkan pada penelitian ini menekankan faktor kebijakan fiskal-politik (regulasi, ekspor tambang, dan kepemimpinan daerah) sebagai penentu peningkatan kesempatan kerja. Harapanya dengan dibuka kembali ekspor di bidang pertambangan penyerapan tenaga kerja formal meningkatnya dan dampaknya peningkatan ekonomi dan pengurangan pengangguran sudah pasti terjadi, sehingga kesempatan kerja juga bertambah. Walaupun jika melihat trend lapangan usaha yang menjanjikan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi

NTB 2024-2028 bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang tertinggi sebagaimana hasil data di bawah ini :

Tabel 1. Perkiraan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Provinsi NTB Tahun 2024-2028

LAPANGAN USAHA	TAHUN					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</u>	22,643	23,184	23,517	23,908	24,363	24,886
<u>Pertambangan dan Penggalian</u>	18,218	19,148	19,712	20,326	20,998	21,734
<u>Industri Pengolahan</u>	4,645	4,765	4,843	4,932	5,035	5,152
<u>Pengadaan Listrik dan Gas</u>	119	128	136	144	153	162
<u>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</u>	80	83	85	87	90	92
<u>Konstruksi</u>	10,575	10,486	10,677	10,895	11,143	11,422
<u>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</u>	14,738	14,935	15,320	15,745	16,213	16,730
<u>Transportasi dan Pergudangan</u>	5,844	4,972	4,774	4,587	4,409	4,238
<u>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</u>	1,556	1,317	1,283	1,252	1,223	1,197
<u>Informasi dan Komunikasi</u>	3,015	3,254	3,417	3,589	3,771	3,967
<u>Jasa Keuangan dan Asuransi</u>	3,819	4,205	4,362	4,530	4,711	4,907
<u>Real Estate</u>	3,268	3,393	3,493	3,603	3,723	3,854
<u>Jasa Perusahaan</u>	196	197	203	209	216	224
<u>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</u>	5,233	5,502	5,628	5,768	5,924	6,098
<u>Jasa Pendidikan</u>	5,080	5,306	5,477	5,662	5,864	6,084
<u>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</u>	2,393	2,501	2,594	2,695	2,803	2,920
<u>Jasa Lainnya</u>	2,485	2,497	2,570	2,650	2,737	2,832

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proyeksi tahun 2024 hingga 2028 menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang secara konsisten mengalami peningkatan dari Rp23.184 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp24.886 miliar pada tahun 2028. Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami tren serupa, naik dari Rp19.148 miliar menjadi Rp21.734 miliar dalam periode yang sama. Di sisi lain, sektor industri pengolahan, meskipun menunjukkan pertumbuhan tahunan, tetap berkontribusi relatif kecil terhadap keseluruhan PDRB, mencerminkan keterbatasan dalam transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. (Indrani & Rachman, 2024) menegaskan bahwa investasi dan tenaga kerja berkontribusi besar terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi NTB, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan pertambangan. Hal ini sejalan dengan proyeksi PDRB NTB, di mana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan menjadi tulang punggung ekonomi provinsi. Sedangkan temuan dari (Sanjani & Sari, 2024) terletak pada penekanan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah hal ini sejalan dengan data proyeksi PDRB yang

menunjukkan kontribusi dominan dari sektor pertanian dan pertambangan, namun dengan peran industri pengolahan yang tetap kecil. Sektor jasa seperti pendidikan, keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan stabil, yang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal awal pergeseran menuju ekonomi berbasis pengetahuan, walaupun kontribusinya masih belum dominan dalam struktur makroekonomi daerah.

Dari hasil evaluasi terhadap tren pertumbuhan antar sektor dalam PDRB Provinsi NTB, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang lebih progresif untuk mengurangi dominasi sektor ekstraktif dan primer. Kenaikan signifikan dalam sektor jasa pendidikan dan informasi yang masing-masing tumbuh sekitar 16% dan 22% selama lima tahun mengindikasikan potensi besar untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital sebagai penopang pembangunan ekonomi jangka panjang. Namun, lambatnya pertumbuhan sektor manufaktur serta penurunan pada sektor transportasi dan akomodasi mencerminkan adanya stagnasi dalam integrasi antar sektor. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB perlu mengadopsi strategi pembangunan ekonomi berbasis kluster dan hilirisasi komoditas unggulan, disertai dengan penguatan konektivitas antar wilayah dan insentif bagi investasi industri pengolahan. Pendekatan ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan PDRB secara kuantitatif, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan hingga tahun 2028.

STRUKTUR KETENAGAKERJAAN NTB



Gambar 1. Struktur Ketenagakerjaan NTB
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi NTB, 2024

Berdasarkan gambar 1 diatas struktur ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024 menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sebesar 212,57 ribu orang. Dari total penduduk usia kerja yang mencapai 4,13 juta jiwa, sebanyak 3,19 juta orang termasuk dalam kategori angkatan kerja (AK), sementara 941,22 ribu jiwa berada di luar angkatan kerja (BAK). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 3,11 juta orang tercatat bekerja, yang terbagi atas 1,85 juta pekerja penuh (≥ 35 jam/minggu) dan 785,96 ribu pekerja paruh waktu (< 35 jam/minggu). Selain itu, terdapat 472,91 ribu orang dalam kategori setengah pengangguran. Adapun jumlah pengangguran terbuka di NTB mencapai 87,01 ribu orang, dengan peningkatan sebesar 3,77 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini mengindikasikan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks, di mana tingginya proporsi pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran menunjukkan adanya tantangan dalam kualitas penyerapan tenaga kerja, meskipun secara kuantitatif jumlah pekerja meningkat. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah pekerja secara absolut, belum terjadi transformasi struktural dalam pasar kerja yang mampu menyerap tenaga kerja secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ketenagakerjaan di NTB harus berorientasi pada peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan lapangan kerja formal, serta integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dan dinamika demografi tenaga kerja. Dalam pandangan (Firmansyah et al., 2024) menyoroti bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor IKM dipengaruhi oleh keterbatasan modal, tingkat pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, sehingga kapasitas sektor ini untuk menyerap tenaga kerja secara optimal masih terbatas. Hal ini selaras dengan data ketenagakerjaan NTB yang menunjukkan tingginya jumlah pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran, mencerminkan bahwa banyak tenaga kerja terserap dalam pekerjaan yang tidak sepenuhnya produktif atau tidak sesuai dengan jam kerja penuh. Berbeda dengan temuan dari (Salihin, 2020) menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, meskipun tidak menyoroti secara langsung kualitas pekerjaan atau perbedaan antara sektor formal dan informal.

BAB 6. KESIMPULAN

Merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi NTB, memproyeksikan persediaan tenaga kerja lima tahun kedepan 2024-2028 sebesar 4.186. 375 oarang di tahun 2024, naik sebesar 4.747.490 orang pada tahun 2028, dengan proporsi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur (25,56%), Kabupaten Lombok Tengah (20,92%). Dan Lombok Barat (13,06%). Jumlah angka tenga kerja terebut dihitung berdasarkan perkiraan penduduk usia kerja. Dari hasil tersebut memberi gambaran, bahwa langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi, bagaimana mampu mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan Rencana kerja yang sudah disusun, sehingga antara rencana dan implementasi sesuai dengan outputnya. Mengingat rezim yang terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru menjabat enam bulan, untuk itu dibutuhkan komitmen politik untuk mewujudkan impelemntasi pembangunan ketenagakerjaan yang tujuannya terciptanya lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & ... (2023). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2021. ... *Pembangunan*. <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/70>
- Anita, N. (2016). Perlindungan Hukum Hak Hak Pekerja Berdasarkan Undang Undang Ketenagakerjaan. *Zitteliana*, 18(1), 22–27.
- Arliman S, L. (2017). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(1), 74–87.
- Ashari, A. (2023). ... *Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Lombok eprints.ipdn.ac.id*.
- Fatahillah, M. A., & Padang, A. T. (2019). Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Hukum.Unik.Kediri.Ac.Id*, 3(2), 402–413.
- Firmansyah, M., Sahri, S., Irwan, M., & ... (2024). Perubahan Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat. ... *Pembangunan*. <https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/199>
- Indrani, S. M., & Rachman, R. (2024). PERAN INVESTASI DAN TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. <http://e-journalpppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/1546>
- Lianto, V., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi Perlindungan Sosial Cuti Haid terhadap Tenaga Kerja Perempuan. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 110–121. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7542>
- Muharam, A. S., Ismed, K., Nurhani, N., & Muhyiddin. (2022). Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). In *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol. 17, Issue 2, pp. 121–132). *academia.edu*. <https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.149>
- Nasution, M. (2021). Hubungan Bonus Demografi , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Indeks Pembangunan. *Jurnal Budget*, 6(1), 74–95.

- Salihin, A. (2020). ... Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*.
<https://www.neliti.com/publications/485589/pengaruh-pengeluaran-pemerintah-tenaga-kerja-dan-indeks-pembangunan-manusia-terh>
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2024). ... PENGANGGURAN, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*. <https://www.jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/EKBI/article/view/1375>
- Si hombing, P. R., Widdia Angraini, Busminoloan Busminoloan, & Usep Nugraha. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia di Masa Pandemi 2020. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 52–60. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i3.384>
- Sinaulan, R. D. (2019). Masalah Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.32884/ideas.v5i1.173>
- Wahidin, M. Firmansyah, & Astuti, E. (2021). Analisis Pola Dan Struktur Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Mataram Dan Hubungan Kota Mataram Dengan Kabupaten Sekitarnya Di Pulau Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.34>
- Wazari, E. Z., & Agustiarini, K. D. (2022). Impikasi Modal Manusia dan Ekonomi Digital terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal di Nusa Tenggara Barat pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Official Statistics*.
<https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/1458>
- Wibowo, R. J. A. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan. In *Jurnal Ketenagakerjaan* (Vol. 18, Issue 2, pp. 109–123). pdfs.semanticscholar.org.
<https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.211>

Lampiran 1

Submissions

My Queue
Archives

My Assigned
 Search
New Submission

1990
Amil Amil, Rifaid Rifaid, ayatullah Hadi
Submission

Analisis Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan

1 of 1 submissions

Lampiran 2. Laporan Penggunaan Anggaran

NO	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Honorarium	600.000
2	Bahan Habis pakai dan Peralatan	1.200.000
3	Perjalanan	1.200.000
4	Publikasi Jurnal Sinta 3 (JGLP: Jurnal of Governmet and Local Politics)	1.000.000
	Total Biaya yang Diperlukan (Rp)	4.000.000

Tabel 5.2.
Justifikasi Anggaran Penelitian

1. HONOR				
NO	Pelaksana Kegiatan	Honor (Rp)	Jumlah Bln/Thn	Jumlah Biaya (Rp)
1	Ketua Peneliti	300.000	3	300.000
2	Anggota Peneliti	150.000 x 2 Orang	3	300.000
SUB TOTAL 1 (Rp)				600.000

